

**AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MEDAN SEBAGAI
FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS**

SKRIPSI

ELVIRA FARADILA

NPM : 1403110066

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Elvira Faradila

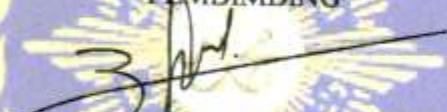
NPM : 1403110066

Program Studi : Ilmu Komunikasi

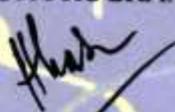
Judul Skripsi : Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas

Medan, 22 Maret 2018

PEMBIMBING


M.SAID HARAHAP, S.Sos, M.I.Kom

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom

DEKAN


Dr. RUDIANTO, M.Si

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : Elvira Faradila

NPM : 1403110066

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari : Kamis, 29 Maret 2018

Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. RUDIANTO, M.Si

PENGUJI II : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PENGUJI III : M.SAID HARAHAHAP, S.Sos, M.I.Kom

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris



Drs, ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Elvira Faradila, NPM 1403110066, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 Maret 2018

Yang menyatakan,



Elvira Faradila

ABSTRAK

Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas

Elvira Faradila
1403110066

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui aktivitas humas DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas; (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas humas DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas.

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat DPRD Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pejabat humas dan data sekunder diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas humas DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publisitas belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari publisitas yang belum efektif, kurangnya pengenalan masyarakat akan fungsi DPRD Kota Medan. Adapun faktor pendukung dan penghambat aktivitas humas DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas yaitu: adanya fasilitas yang memadai seperti ketersediaan teknologi dan jaringan komunikasi sehingga diharapkan mampu memudahkan kinerja kehumasan itu sendiri. Sedangkan faktor yang menghambat yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang berkompetensi. Humas DPRD kedepannya harus lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Humas, Fungsi Mediator dan Fungsi Publisitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas**” tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda **Djamiluddin** dan Ibunda **Nuraini**, Serta abang, kakak dan ipar saya **Eko Sandro Pandu Budi Tama, Ratih Purwasih, Krisdian Sukandar, Syaulistia Mingsih, S.E, Desi Armayani, dan Ahmad Sayuti** yang telah memberikan semangat dan banyak dukungan moral serta nasehat kepada saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Rudianto S.Sos M. Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Alm. Drs. Tasrif Syam M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhasanah Nst. S. Sos M. Ikom dan Bapak Akhyar Anshori S.Sos M.Ikom selaku Kepala Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Said Harahap S.sos, M.Ikom selaku pembimbing saya yang telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-Dosen FISIP UMSU dan Biro Fakultas FISIP UMSU.
7. Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan yang telah memberikan saya izin untuk melakukan riset.
8. Kabag Humas dan Staff Humas yang bersedia penulis wawancarai.
9. Para pejuang S.Ikom dari semester pertama, sahabat saya Intan Putri Yosefa, Fitri Yolanda Febriani, Maya Resti Andini, Anantha Ditratama, M. Andre Syahputra, Mohd Yopie Gunawan, Chairil Mauriza, Syahputra Rizky Sihombing.
10. Para penghuni kost Dea Rahma Hutasuhut dan Ade Riski Kartika Damanik
11. Penyemangat saya agar segera menuntaskan skripsi Tri Wahyu Septian
12. Stambuk 14 FISIP UMSU, dan juga semua senior yang telah membimbing, memberi arahan, dan memberikan kontribusi untuk skripsi saya.

Medan, 21 Maret 2018
Penulis

Elvira Faradila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Komunikasi Massa.....	7
2.1.1 Pengertian Komunikasi Massa.....	7
2.1.2 Karakteristik Komunikasi Massa.....	9
2.1.3 Fungsi Komunikasi Massa.....	10
2.1.4 Proses Komunikasi Massa.....	13
2.2 Humas (Public Relations).....	13
2.2.1 Definisi Humas (Public Relations).....	13
2.3 Humas Pemerintahan	15
2.3.1 Standar Tata Kelola Kehumasan Pemerintahan	18
2.4 Fungsi Mediator.....	20
2.5 Fungsi Publisitas.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Kerangka Konsep	29
3.3 Definisi Konsep	31
3.4 Informan atau Narasumber	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34

4.2 Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hampir semua perusahaan dan instansi, baik swasta maupun negeri yang bergerak di berbagai bidang mulai memperhatikan pentingnya peran humas seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagai suatu kegiatan yang akan memberikan citra positif di dalam maupun diluar tubuh perusahaan itu sendiri. Humas memiliki peranan yang cukup besar dalam sebuah organisasi di dukung oleh keterbukaan informasi publik saat ini. Humas yang merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan lembaga pemerintahan pada masyarakat ini sejalan dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 30 tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola masa lingkungan instansi pemerintah. Humas juga memiliki fungsi yang sangat penting yaitu membangun citra positif dari masyarakat bagi instansi tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (Parlemen) daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Sumatera Utara bersama dengan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat dalam menyelenggarakan setiap tugas pemerintahannya harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan salah satu cara dalam membangun kepercayaan itu melalui keterbukaan informasi (Publisitas) pada masyarakat.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang di perlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di bentuk sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang personalnya terdiri atas dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertugas menyediakan serta mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin seorang seretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di angkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrative bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan di bentuk salah satu bagian yaitu bagian dokumentasi, publikasi, protocol yang biasa disebut Hubungan Masyarakat (Humas).

Humas dalam lembaganya harusnya menjalankan fungsi dengan baik dan serasi antara *public intern* dan *public ekstern* dalam rangka memberikan pengertin, menumbuhkan motivasi dan pasrtisipasi. Komunikasi sosial harus

berkembang antara pemerintahan dan rakyat, kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya.

Ruslan (2010:343) menuliskan fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya antara lain sebagai berikut :

Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya,

- Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan program-program kerja secara nasional kepada masyarakat,
- Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publik nya di lain pihak.
- Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Humas suatu alat memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi kepada khalayak dengan menggunakan media. Kehadiran humas bukan merupakan unit struktual yang kaku karena di ikat oleh prosedur dan birokrasi yang ada, tetapi posisinya yang langsung berhubungan dengan pimpinan, petugas humas pun harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang di hadapkan kepadanya jika begitu kaku akan menghambat termasuk pula apabila kurang kemampuan humas itu sendiri, baik kualitas, keterampilan dan lain-lain.

Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup kegiatan yang menyangkut banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak) , baik didalam (*public intern*) diluar (*public ektern*). Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khalayak dan kedalam menyerap reaksi dari khalayak. Organisasi atau lembaga mempunyai tujuan dan berkehendak untuk mencapai tujuan itu (Bungin, 2008:2) .

Dalam pelaksanaan kinerja humas sering kali ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dianggapi salah oleh masyarakat. Ini di indikasikan terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampaian pesan yang baik, dan humas harus mampu memfasilitasi nya dengan menjalankan fungsi mediasi dan publisitas. Atas dasar tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti :

“ Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan latar belakang diatas, adalah sebagai berikut :

Bagaimana Aktivitas Humas DPRD Kota Medan sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Ativitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas.
- b. Untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang hubungan masyarakat (humas) dan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih mengenai salah satu aktivitas Humas DPRD Kota Medan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dan menyempurnakan Aktivitas Humas DPRD Kota Medan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

- BAB II :** Berisikan uraian teoritis yang menguraikan tentang komunikasi massa, Humas (public relations), Humas pemerintahan, Fungsi Mediator dan Fungsi Publisitas.
- BAB III :** Berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.
- BAB IV :** Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan Penyajian Data, Profil Narasumber, Hasil Penelitian dan Pembahasan.
- BAB V :** Berisikan Penutup yang menguraikan Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi Massa

2.1.1 Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi Massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas (Bungin, 2008:7).

Menurut Effendy (2009:50) komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa. Komunikasi massa merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Isi komunikasi massa bersifat umum dan terbuka. Oleh karena itu, maka sumber komunikasi massa bukanlah satu orang, melainkan suatu organisasi formal dan sang pengirimnya seringkali merupakan komunikator profesional.

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang dihasilkan, pembaca, pendengar, penonton yang akan coba diraihnya, dan efeknya kepada mereka. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa disini menunjukkan kepada khalayak,, audience, penonton, pemirsa, pembaca. Ada banyak versi tentang bentuk dari media massa

dalam komunikasi massa antara lain media elektronik (televisi, radio), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, dan film (Nurudin, 2013:4).

Menurut Burhan Bungin (2008:71) unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah:

- a. Komunikator adalah pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi telematika modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi untuk cepat diterima oleh publik,
- b. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massa pula,
- c. Informasi (pesan) massa adalah informasi yang diperuntukan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi,
- d. *Gatekeeper* adalah penyeleksi informasi setiap informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan. Bahkan mereka memiliki kewenangan untuk memperluas, membatasi informasi yang akan disiarkan tersebut.
- e. Khalayak adalah massa yang menerima pesan informasi massa yang disebarkan oleh media massa, terdiri dari public pendengar atau pemirsa sebuah media massa,
- f. Umpan balik dalam komunikasi massa merupakan umpan balik bersifat tertunda, sedangkan pada komunikasi tatap muka berarti langsung.

Ada dua tugas komunikator dalam komunikasi massa : mengetahui apa yang dia ingin komunikasikan, dan mengetahui bagaimana dia harus

menyampaikan pesannya dalam rangka melancarkan penetrasi kepada benak komunikan (Effendy, 2009:80).

2.1.2 Karakteristik Komunikasi Massa

Menurut Hafied Cangara (2005:10) dalam bukunya “pengantar komunikasi” komunikasi massa merupakan salah satu dari komunikasi yang memiliki perbedaan signifikan dengan bentuk komunikasi yang lain, karena memiliki sejumlah ciri atau karakteristik yang khas diantaranya:

a. **Komunikator terlembaga**

Dalam komunikasi massa, komunikator atau sumber yang menyampaikan pesan bukanlah secara personal, namun bersifat melembaga. Lembaga penyampai pesan komunikasi massa inilah dinamakan media massa, seperti televisi, surat kabar, radio, internet.

b. **Pesan bersifat umum**

Dalam proses komunikasi massa pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Dengan demikian, maka proses komunikasi massa bersifat terbuka. Hal ini dikarenakan komunikan tersebar di berbagai tempat yang tersebar.

c. **Komunikan Heterogen**

Komunikan atau penerima komunikasi dalam media massa bersifat heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi media massa menyampaikan pesan secara umum pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan suku, ras, agama serta memiliki beragam karakter psikologi, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, adat budaya, maupun strata sosial.

d. Media Massa bersifat Keserempakan

Artinya media massa adalah kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dengan komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah.

e. Pesan yang disampaikan satu arah

Artinya tidak terjadi satu interaksi antara komunikator dan komunikan secara langsung, sehingga komunikator aktif menyampaikan pesan sementara komunikan pun aktif menerima pesan namun tidak ada interaksi diantara kedua yang menyebabkan tidak terjadinya proses pengendalian arus informasi.

2.1.3 Fungsi Komunikasi Massa

Menurut (Dewi, 2006:14) fungsi komunikasi massa secara menyeluruh dapat dirinci kembali sebagai berikut:

a. Informasi

Mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan opini dan komentar, sehingga orang luas mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya.

b. Sosialisasi

Menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.

c. Motivasi

Mendorong seseorang untuk mengetahui kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat dan dengar melalui media massa.

d. Bahan diskusi

Menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk mencapai persetujuan dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang banyak.

e. Pendidikan

Membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik pendidikan formal maupun nonformal.

f. Memajukan kebudayaan

Media massa menyebarkan hasil-hasil kebudayaan melalui aneka program siaran atau penerbitan buku.

g. Hiburan

Media massa telah menyita banyak waktu luang dari semua golongan usia dengan di fungsikannya media komunikasi sebagai alat hiburan dalam rumah tangga.

h. Integrasi

Menyembatani perbedaan antara suku bangsa maupun antar bangsa dalam upaya memperkuat hubungan dan pemerataan informasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Dominick dalam Ardianto, (2004:14-17)

yaitu fungsi komunikasi terdiri dari :

a. *Surveillance* (Pengawasan)

Fungsi ini menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan maupun yang dapat membantu khlayak dalam kehidupan sehari-hari.

b. *Interpretation* (Penasiran)

Fungsi ini mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antarpersonal atau komunikasi kelompok.

c. *Linkage* (Pertalian)

Fungsi ini bertujuan dimana media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk *linkage* (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

d. *Transmission of values* (Penyebaran nilai-nilai)

Fungsi ini artinya bahwa media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan.

e. *Entertainment* (Hiburan)

Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan di televisi dapat membuat pikiran khalayak segar kembali.

2.1.4 Proses komunikasi massa

Menurut McQuail, proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk : (Bungin, 2008: 74-75)

- a. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar.
- b. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu komunikator ke komunikan.

- c. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan, sehingga menyebabkan komunikasi yang terjadi diantara mereka berlangsung datar dan sementara.
- d. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersona (nonpribadi) dan tanpa nama.
- e. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan hubungan-hubungan kebetulan masyarakat.

2.2 Humas (*Public Relations*)

2.2.1 Definisi Humas (*Public Relations*)

Humas merupakan suatu subjek yang relatif masih baru, yang menimbulkan konsep dimana kita tidak menemukan konsensus pendapat sepenuhnya atas definisi yang dirasakan tepat untuk istilah itu. Penggunaan istilah “humas” yang semakin luas dan serampangan cenderung mengaburkan arti yang sebenarnya bagi masyarakat pada umumnya; semakin berkembangnya fungsi humas yang hakikatnya berbeda dalam kesalah pengertian (*missunderstanding*) mengenai peranan yang sebenarnya di dalam masyarakat modern (Moore, 2005:4).

Humas melibatkan berbagai jenis khalayak dan organisasi. Hubungan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh perusahaan publik dan perusahaan bisnis, tetapi juga boleh asosiasi perdagangan atas nama industri-industri tertentu, asosiasi atas nama anggota mereka, dan organisasi dan nirlaba lainnya serta pemerintahan kota-kota, Negara dan berbagai instansi pemerintah. Sedangkan masyarakat disini adalah para pemegang kepentingan yang cukup bervariasi,

termasuk pemegang saham dan investor, karyawan atau anggota pelanggan dan konsumen, regulator pemerintah, media, dan masyarakat di mana organisasi itu berada (Hermawan, 2012:152) .

Menurut definisi kamus terbitan *Institute of Public Relations* (IPR), yakni sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan bulan November 1987, “humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”. Jadi, humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang terorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur (Anggoro, 2000:2).

Pada pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1978, ditetapkan definisi humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplemintasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya (Anggoro, 2000:2).

2.3 Humas Pemerintahan

Pada dekade 1970-an peranan humas telah ditetapkan diberbagai instansi pemerintah serta lembaga/perusahaan sebagai upaya menjembatani, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi atau pesan – pesan dari lembaga/organisasi yang diwakilinya kepada publik/masyarakatnya. Cutlip,

Center, dan Brown menyebutkan humas adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian, pemahaman, dan kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya (Cutlip, Center, dan Brown, 2009:4)

DR.Rex Harlow, *The statement of Mexico dan International Public Relations Association (IPRA)* di Mexico City mengatakan aktivitas utama Humas adalah salah satunya melakukan fungsi-fungsi “manajemen komunikasi” antara organisai/lembaga yang di wakilinya dengan publik sebagai khalayak sasaran. Khususnya dalam usaha untuk mencapai citra positif, menciptakan kepercayaan, dan membina hubungan baik dengan *stakeholder* atau audiencenya, dengan kata lain membangun identitas dan citra korporat (*building corporate identity and image*). Denny Griswold (Soemirat, 2010 : 12) juga menyebutkan bahwa humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik , memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik.

Humas pemerintah yang bertindak sebagai komunikator, membantu mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga yang bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan. F.Rachmadi menyebutkan secara struktural , Humas adalah bagian integral dari suatu lembaga/perusahaan, salah satu fungsi yaitu manajemen *modern* (Soemirat, 2010:87). Secara garis besar Humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar memberikan informasi atau pesan – pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi,

atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.

Ruslan (2010 : 343) Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya antara lain sebagai berikut :

- Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya,
- Memeberikan pelayanan, dan menyebarkan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program – program kerja secara nasional kepada masyarakat,
- Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan – keinginan publiknya di lain pihak,
- Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ruslan (2010 : 345) menyatakan pejabat humas harus memiliki kemampuan untuk menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut :

- Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sarannya,

- Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif, dinamis, efektif, saling mendukung, bagi kedua belah pihak dan menarik perhatian terhadap audiensnya.
- Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (*opini public*) yang menggantungkan instansi/lembaganya,
- Kemampuan untuk menjalin hubungan baik atau kerja sama, dan saling mempercayai dengan berbagai pihak terkait.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapi Humas secara rutin, yaitu sebagai berikut :

- Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal dan internal.
- Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari instansi/lembaga maupun bersasal dari publiknya.
- Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga.
- Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga/instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya.
- Kemampuan membuat produk publikasi humas, misalnya kliping, *pressrelease*, *newsletter*, majalah PR *internal*, bulletin, brosur , poster, dan lain sebagainya.

Di Indonesia lembaga kehumasan sangat diperlukan. Humas merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat membutuhkan banyak informasi dari keterbukaan sebuah lembaga agar mereka mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain demi kemajuan instansi yang bersangkutan, humas tidak hanya memberikan informasi kepada publiknya akan tetapi humas juga menerima informasi dari publiknya. Dengan kata lain ciri khas dari humas adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik.

2.3.1 Standar Tata Kelola Kehumasan Pemerintah

Standar Tata Kelola Kehumasan Pemerintah ini di jadikan rujukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun pedoman pengelolaan kehumasan DPRD. Revitalisasi kehumasan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme hubungan masyarakat (humas) sebagai ujung tombak pengelolaan informasi, dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Pedoman umum tata kelola kehumasan disusun sebagai acuan dalam membangun dan mengembangkan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan menciptakan

pengelolaan kehumasan dilingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 20018 Pasal 7 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan, setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, dan akurat. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dimaksud mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Visi humas pemerintah kemudian disusun secara lebih detail yaitu terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaa, dan SDM) yang proposional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik. Dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun citra dan reputasi positif pemerintah,
2. Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik,
3. menampung dan mengelola aspirasi masyarakat,
4. Mencari, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi,
5. Menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah,
6. Membangun kepercayaan publik (*public trust*).

Asas umum humas pemerintah adalah keterbukaan, objektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel dan integrasi tinggi. Dengan model kehumasan birokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas informasi. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang lebih interaktif dengan menggunakan model komunikasi dua arah atau timbal balik yang simetris. Tujuan model ini adalah menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh seimbang, adapun strategi yang dilakukan humas pemerintah dalam menjalankan setiap tugasnya yaitu:

1. Pembangun hubungan *internal* dan *eksternal*,
2. Penyelenggara pertemuan dan koordinasi antar instansi,
3. Penyedia informasi pemerintah,
4. Pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa,
5. Pendorong upaya pemberdayaan masyarakat,
6. Pengelola sarana dan prasarana kehumasan,
7. Pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah,
8. Pengelola informasi pemerintah dan pembangunan.

Tugas humas pemerintah pula dijabarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama,
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik,
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah,
4. Membangun citra dan reputasi politik

Humas pemerintah memiliki fungsi yaitu, membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi posisit instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Humas pemerintah pula menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, menjadi penghubung instansi dengan publiknya, serta melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dlam pengelolaan informasi.

2.4 Fungsi Mediator

Salah satu fungsi humas pemerintah yaitu sebagai mediator. Fungsi mediator terkait langsung dengan masalah hubungan. F. Rachmali (Soemirat 2010:6) mengatakan bahwa masalah hubungan (*relationship*) merupakan hal yang sangat penting. Sehingga sangat penting bagi humas sebagai penghubung antara organisasi dengan publiknya, humas berada di tepi perusahaan dengan kata lain memainkan peran diperbatasan seperti yang dikatakan Grunig dan Hunt (Soemirat, 2010:87), sedangkan (Ruslan, 2008:110) menyatakan fungsi pokok Humas Pemerintah yaitu menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat) di lain pihak. Grunig dan Hunt menyatakan fungsi Humas sebagai mediator. Sebagai mediator humas tidak lepas dari aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan unsur utama yang terkandung di dalamnya.

Aktivitas komunikasi berkaitan dengan usaha memelihara komunikasi dua arah atau timbal balik bagi suatu tim kerjasama antar departemen, dan sekelompok orang dalam suatu organisasi (*public internal*) serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dapat dilihat dalam arti luas, seperti interaksi satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara perusahaan dan publik untuk mencapai kepuasan kedua belah pihak. Komunikasi dua arah timbal balik tersebut merupakan faktor utama untuk manajemen kehumasan, proses tersebut terlihat dari beberapa tahap, antara lain pengorganisasian, pengkomunikasian, pengawasan, dan penilaian. Scott M.Cutlip & Allen H.Center menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja Humas melalui empat proses tahapan atau langkah – langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah penelitian dan mendengarkan (*Research-Listening*) , perencanaan dan mengambil keputusan (*Planning-Decision*), mengkomunikasikan dan pelaksanaan (*Communication-Action*), dan mengevaluasi (*Evaluation*).

Ruslan (2010:14) menyatakan bahwa mediator tidak hanya sebagai fungsi namun juga sebagai keterampilan dalam menguasai teknik komunikasi baik melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau menyalurkan informasi dari lembaga organisasi yang diwakili dengan publiknya. Humas merupakan mediator yang berada antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Ciri khas dari mediator ini yaitu komunikasi dua arah karena dalam hal ini humas

bertindak sebagai narasumber informasi (*source of informations*) dan merupakan saluran komunikasi (*channel of information*). Humas sebagai mediator sekaligus komunikator berupaya memebentuk sikap dan pendapat yang positif dari masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi tertentu.

Peranan humas sebagai mediator tidak terlepas dari empat kategori yang telah dibagi oleh Dozier D.M. Salah satunya yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Humas juga bertindak sebagai persuader, sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan mentoleransi yang baik dari kedua belah pihak.

Dalam menjalankan fungsi mediator, aktivitas humas meliputi membina hubungan ke dalam (*publik internal*), yang dimaksud *public internal* adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang Humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Membina hubungan keluar (*public eksternal*), yang dimaksud *public eksternal* adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang

diwakilinya. Dengan demikian, peran humas bersifat dua arah yaitu berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan ke luar (*outward looking*).

2.5 Fungsi Publisitas

Humas yang berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara Humas dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama diwujudkan melalui beberapa aspek pendekatan atau strategi humas. Salah satunya melalui pendekatan persuasif dan edukatif, dalam hal ini Humas menciptakan komunikasi dan arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling Pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Tujuan kegiatan humas pertama kali adalah berupaya menciptakan saling Pengertian (*mutual understanding*) antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi citra positif perusahaan di mata publiknya.

Kata komunikasi menurut Onong Uchjana Effendi (Ruslan 2010:81) berasal dari bahasa Latin : *communication* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Dengan demikian secara garis besar dalam suatu proses komunikasi terdapat unsur – unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau Pengertian, antara komunikator (penyebarnya) dan komunikan (penerima pesan).

Newson dan Siefried (Ruslan 2010:82) mengungkapkan pentingnya peranan komunikasi dalam kegiatan humas terkhusus dalam penyampaian pesan-pesan dalam hal ini informasi demi tercapainya tujuan dan Pengertian, bersama dengan publik, khalayak sasaran yaitu seorang pejabat humas haruslah seseorang yang ahli dalam aspek komunikasi. Dari pernyataan diatas, jelas bahwa praktisi humas mutlak mempunyai keterampilan dalam menguasai aspek teknis komunikasi, atau unsur – unsur pokok dalam proses komunikasi, yaitu sebagai berikut :

- *Source*, yaitu individu atau pejabat Humas yang berinisiatif sebagai sumber untuk menyampaikan pesan-pesannya.
- *Massage*, suatu gagasan, dan ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan, emosi, dan lain sebagainya yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau kelompok tertentu (komunikan).
- *Channel*, berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada khalayak.
- *Effect*, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut. Dapat berakibat positif maupun negatif tergantung dari tanggapan , persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut.

Menurut Robert D. Ross (Ruslan 2010:83), bahwa komunikasi merupakan alat yang penting dalam fungsi humas. Publik mengakui dan menghargai suatu kinerja yang baik dalam kegiatan komunikasi secara efektif, dan sekaligus kinerja yang baik tersebut untuk menarik perhatian publik, serta tujuan penting yang lainnya dari fungsi Humas. Citra positif, dapat terbentuk bila publik mempunyai

persepsi yang positif terhadap perusahaan. Persepsi ini harus lengkap dan tidak setengah – setengah. Agar hal ini dapat dicapai maka publik harus dalam kondisi kecukupan informasi (*well – informed*) tentang perusahaan. Artinya tidak ada kesengajaan informasi antara perusahaan dengan publiknya dan sebaliknya. Hal itu pula dimaksudkan untuk mencegah kesalahan persepsi. Kesalahpahaman akibat persepsi atau kekurangan informasi merupakan kesalahan mendasar dalam kegiatan komunikasi , ketercukupan informasi akan terwujud bila humas menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang timbal balik.

Beberapa definisi publisitas yang dikemukakan para ahli seperti Herbert Baus menyatakan publisitas sebagai pesan yang direncanakan, dieksekusi, dan didistribusikan melalui media tertentu untuk memenuhi kepentingan *public* tanpa membayar pada media. Otis Baskin dan kawan-kawan mendefinisikan publisitas sebagai istilah yang merujuk pada publikasi berita tentang organisasi atau individu yang tidak membayar waktu atau *space*, sedangkan Doug Newson melihat publisitas sebagai informasi tentang organisasi yang dikemas sebagai editorial bukan iklan pada medium publikasi atau berita. Kriyantono (2008:42).

Berdasarkan sumber publisitas, publisitas terbagi menjadi dua yaitu publisitas lisan dan publisitas tulisan.

- Publisitas Lisan adalah publisitas yang bersumber dari pernyataan lisan, misalnya wawancara wartawan dengan humas mengenai suatu peristiwa atau menggelar konferensi pers dengan mengundang wartawan

- Publisitas Tulisan adalah publisitas yang bersumber dari informasi tertulis yang dibuat humas, humas dapat mengirim informasi tertulis ke media dalam bentuk *press- realese*, *back – grounders*, *presskitt*, atau *lette of denial*.

Publisitas menjadi peluang bagi Humas untuk memanfaatkan media massa sebagai penyebar informasi dengan garis, namun juga menjadi tantangan ini berkaitan dengan faktor-faktor dimuat tidaknya informasi dari Humas, ada dua faktor yaitu faktor penulisan materi publisitas dan faktor kualitas hubungan media (media relations). Kita dapat melihat bahwa humas tidak lepas dari kegiatan menulis terlebih untuk menjalankan fungsi publisitasnya. Tugas Humas terkait dengan kegiatan menulis yang dikemukakan Cutlip, Center, dan Broom (Kriyantono, 2008 : 27) terkait hal yang dilakukan spesialis humas di tempat kerja yaitu menulis dan mengedit, dalam hal ini humas menyusun liris berita dalam bentuk cetak atau siaran, cerita *feature*, *newsletter* untuk karyawan dan *stakeholders eksternal*, korespondensi, pesan *website*, dan pesan medi online lainnya, laporan tahunan, dan *shareholder*, pidato, brosur, film, dan *script slide show*, artikel perdagangan, iklan instusional, materi-materi pendukung teknis lainnya. Mengatur dan mengelola konperensi pers, lomba-lomba, konvensi, *open house*, pemotongan pita, *grand opening*, ulang tahun, mengunjungi tokoh terkemuka, program penghargaan, dan lain – lain.

Publisitas yang dilakukan melalui media massa sangat efektif membentuk opini publik. Berita yang ditampilkan atau diekspos keluar oleh media massa merupakan cara efektif pembentukan opini publik atau masyarakat umum. Sudah

dapat dipastikan bahwa setiap topik – topik berita yang dipublikasikan oleh berbagai media massa itu mengandung pembentukan opini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan *factual*. Penulis menggambarkan atau mengambil keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada mengenai aktivitas Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. Penelitian ini lebih menekankan tentang persoalan kedalaman (Kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Penelitian kualitatif bersifat *fleksibel* dan berubah sesuai kondisi lapangan sehingga peran sang peneliti sangat dominan terhadap keberhasilan penelitian.

3.2 Kerangka Konsep

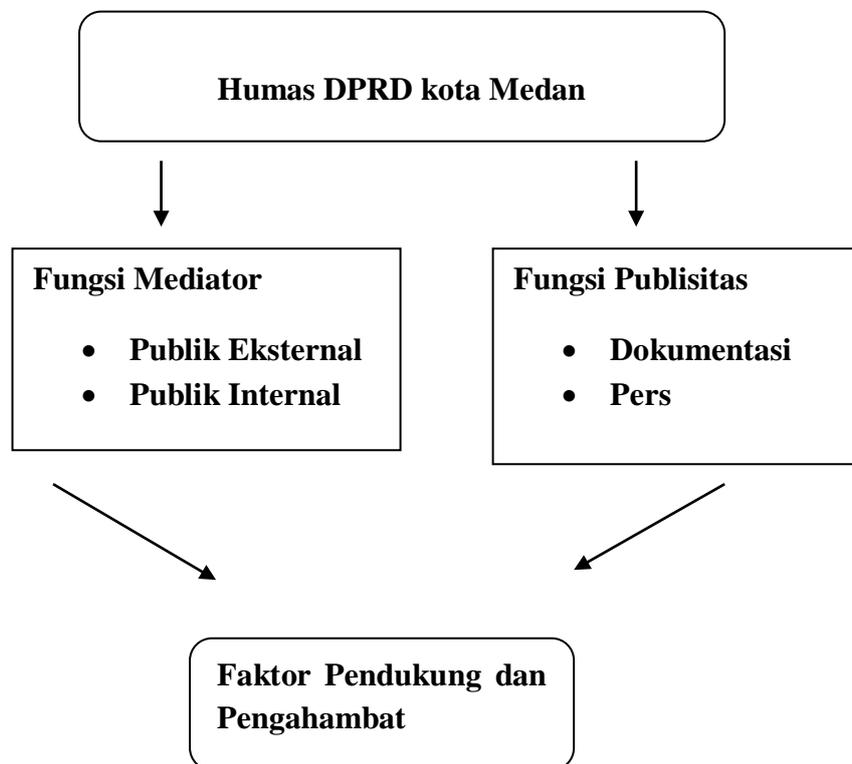
Pada dasarnya tujuan utama dari program kerja dan berbagai aktivitas humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis antar organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan khalayak. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman umum tata kelola kehumasan di instansi pemerintah.

Menurut lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan November 1987 : Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan khalayak. Pada pertemuan asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1987,

ditetapkan definisi humas sebagai berikut : Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis sebagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatan, member masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplemintasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi atau kepentingan khalayak (Anggoro 2000:2)

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Konseptual



3.3 Definisi Konsep

- a. Aktivitas adalah program kerja atau tahap-tahap yang dilakukan dalam Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- b. Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan adalah bagian yang ada dalam sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang dikepalai oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas yang dibawah langsung oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan.
- c. Mediator adalah humas pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan caramemutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- d. Publisitas adalah kegiatan humas mendokumentasikan dan menyebarluaskan kegiatan yang akan atau telah berlangsung tanpa atau melalui media.

3.4 Informan atau Narasumber

Para informan yaitu mereka yang terlibat langsung dan berhubungan dengan aktivitas humas di DPRD Kota Medan agar dapat memberikan informasi yang akurat. Pengambilan informan memakai teknik purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan penelitian.

Sebagai Informan atau Narasumber :

1. Dra. Hj. Yuslizar Usman S.E , M.Si (Selaku Kabag Humas Sekretariat DPRD Kota Medan)
2. Sappe Manurung S.S, M.M (Staff Humas Sekretariat DPRD Kota Medan)
3. Ricky Syahputra S.sos (Staff Humas Sekretariat DPRD Kota Medan)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

- Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Siregar, 2013:18).
- Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, berguna untuk menjelaskan, memeriksa dan merinci gejala yang terjadi (Kriyantono, 2008:84).

b. Data Sekunder

- Data yang diperoleh dari berbagai *literature*, Koran dan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Teknik Analisa Data

Analisa data yang akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hal ini dimaksud agar tetap berada dalam fokus penelitian. Penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argument yang jelas dan memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya, data dan informasi tersebut akan dianalisa secara kualitatif.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Karena analisa penelitian ini bersifat deskriptif, maka penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk

– bentuk aktivitas humas yang ada pada DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Pada bulan Februari 2018 s/d Maret 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas

Hubungan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat terpisah dari sistem manajemen dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan, humas dalam upaya menyelenggarakan komunikasi timbal balik anatar organisasi dengan publiknya terebut dapat menentukan sukses tidaknya usaha organisasi daalam upaya meraih citra positif. Dengan kata lain, humas berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi-informasi mengenai keadaan suatu organisasi yang dianggap penting dan patut diketahui para pihak *stakeholder* atau publik.

Pada dasarnya tujuan utama dari program kerja dan berbagai aktivitas humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis antar organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan khalayak. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman umum tata kelola kehumasan di instansi pemerintah.

Setiap instansi pemerintah, baik yang berskala besar, menengah ataupun kecil tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan timbal balik antar satu bidang dengan bidang lainnya dalam menghadapi setiap permasalahan pemerintah. Oleh karena itu, setiap organisasi instansi pasti membutuhkan bagian yang dapat menjalankan aktivitas yang menghubungkan lembaga / instansi

dengan para publiknya. Pada dasarnya aktivitas humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota sudah diupayakan untuk berjalan dengan semestinya. Penulis mulai menelusuri kinerja humas dikantor ini dengan melakukan wawancara dengan informan terkait.

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai aktivitas humas secara umum. Pola kelola humas di sekretariat DPRD Kota Medan sebenarnya telah mencoba membangun iklim profesional, diantaranya adalah dengan adanya pembagian tugas dalam struktur humas itu sendiri.

”Di bagian dokumentasi, publikasi dan protokol (Humas) ini, kami terbagi menjadi tiga sub-bagian lagi sehingga pekerjaan humas disini cukup mudah untuk diselesaikan karena banyak yang bekerja di dalamnya. Ada yang fokus mengerjakan bagian dokumentasi dan perpustakaan, ada pula yang bekerja khusus di bagian informasi dan publikasi, serta ada yang khusus menangani *protocol* dan pengaduan masyarakat.” (Wawancara dengan Dra. Hj. Yuslizar Usman S.E, M.Si, 19 Maret 2018)

Pernyataan diatas disampaikan KABAG Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, pembagian tugas tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja kehumasan pada tiap bagian sehingga tiap sub-bagian kehumasan bisa fokus terhadap tugasnya masing-masing.

“tugas saya sebagai staff humas disini membuat dan menyebarkan informasi kepada masyarakat sebagai sub-bagian informasi dan publikasi kami juga bekerja sama dengan media untuk menyampaikan ke masyarakat tentang kinerja anggota dewan.” (Wawancara dengan Bapak Sappe Manurung S.S, M.M, 19 Maret 2018)

Pembagian kinerja yang sangat spesifik ini memungkinkan kinerja humas dikantor ini menjadi maksimal dikarenakan pekerjaan yang tidak terlalu banyak. Pola pembagian kinerja seperti ini penulis dapatkan sudah dilakukan dalam selang waktu yang sudah sangat lama dan artinya pola ini telah menjadi budaya

kehumasan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Kelebihan budaya pembagian kinerja ini bagi staff humas diantaranya tidak diperlukan waktu yang sangat lama untuk menyesuaikan kinerja bagi staf yang baru. Selain itu kinerja akan lebih gampang terpantau.

Namun terlepas dari budaya turun menurun di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan ini juga memiliki kekurangan. Terkadang urusan-urusan tersebut membuat para staf menjadi tidak inovatif dan menumpulkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Konteks dan sebuah instansi kehumasan pemerintah.

“setiap humas disini, diberi uraian pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu setiap orang tau apa yang harus dikerjakan.” (Wawancara dengan Kabag Humas, 19 Maret 2018)

Inilah yang menjadi penyebab kreativitas staf humas dalam menjalankan fungsinya menjadi terkekang. Uraian tugas sudah sangat lama tidak diperbaharui mendukung hal itu. Selain itu budaya organisasi pemerintahan yang menjadikan pimpinan sebagai “raja” dalam sebuah instansi semakin mendukung macetnya sebuah inovasi baru untuk bermunculan.

“bagian humas ini berusaha membantu memfasilitasi anggota dewan. Menjembatani antara dewan dan media serta membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja anggota dewan itu sendiri” (wawancara dengan Ricky Syahputra S.sos, 19 Maret 2018)

Penulis akan memasuki bagian penjabaran tentang aktivitas humas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sebagai fungsi mediator sebagai mana dituliskan pada bab II fungsi ini dalam sebuah instansi pemerintah terbagi dua. Ada yang bersifat ke dalam dan ada yang bersifat keluar.

Peran itu nampak ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan reses atau ada pembawa aspirasi oleh masyarakat itu sendiri dalam bentuk demonstrasi yang datang langsung ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Demonstrasi untuk ukuran kota Medan sudah terbilang sangat sering terjadi. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan staf humas tentunya sudah sangat tidak asing lagi menghadapi kondisi ini. Beberapa staf kemudian menanggapi bagaimana harus melaksanakan fungsinya ketika para demonstran berdatangan.

“contoh kasus demo. Kami adalah jembatan ke dewan, kami memediasi mereka ketemu dewan. Setelah mereka diterima kami buat rilisnya” (Wawancara dengan Sappe Manurung S.S, M.M, 19 Maret 2018)

Memang dari sekian banyak mediasi yang bisa dilakukan, Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan hanya membatasi urusan memenuhi tuntutan aspirasi pengunjuk rasa atau kru media massa yang datang ke kantor. Tidak ada pengklarifikasian publik yang dapatkan seperti yang terjabarkan format tata kelola kehumasan pemerintah. Ini dibuktikan dengan seluruh staf yang penulis temui menganggap mediasi secara sempit, sekedar berurusan dengan demonstran. Kabag Humas Menegaskan bahwa :

“sebagai fungsi mediator dan publisitas, saya boleh katakan bahwa humas telah melaksanakan fungsi tersebut. Dimana sub-bagian Protokol dan Pengaduan Masyarakat menjalankan fungsi mediator antara anggota dewan dengan para pendemo lalu dilanjutkan penerbitan tentang penerimaan aspirasi tersebut melalui website atau media yang ada saat itu oleh sub-bagian Informasi dan Publikasi” (Wawancara dengan Kabag Humas, 19 Maret 2018)

Menghadapi urusan demonstrasi menurut humas mereka telah melakukan prosedur penanganan. Berikut adalah tahap penanganan demonstrasi yang berhasil penulis simpulkan:

1. Tahap penerimaan, tahap ini menurut staf humas ialah menerima para pengunjung rasa yang biasa dilakukan di halaman kantor dewan. Bila yang melakukan aspirasi sudah merupakan kedatangan yang kedua kalinya dan telah membuat perjanjian dengan humas maka biasanya sudah disiapkan oleh para pengunjung rasa.
2. Tahap pemanggilan perwakilan massa, negosiasi berlangsung dan biasanya humas meminta beberapa orang dari massa untuk masuk keruangan. Para pengunjung rasa terkadang sudah menyiapkan negosiator yang akan masuk berhadapan langsung dengan Tim Penerima Aspirasi yang bertugas pada saat itu.
3. Tahap penyampaian kepada Pimpinan dewan dan komisi terkait. Tim penerima aspirasi membuat laporan kepada ketua DPRD lalu selanjutnya direkomendasikan ke komisi yang berkaitan dengan tuntutan demonstran.
4. Tahap publikasi. Dalam pertemuan Tim Penerima Aspirasi dengan pihak demonstran, humas membuat laporan yang kemudian dipublikasikan melalui website sekretariat DPRD itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada pihak wartawan yang hadir saat diskusi berlangsung, mempublikasikan langsung pertemuan tersebut melalui medianya.

Seluruh staf humas dan beberapa anggota dewan yang membenarkan bahwa fungsi mediator humas sudah dijalankan dengan baik. Namun, ada pula anggota dewan yang memang belum mengakui hal tersebut. Hasil observasi penulis memang mendapatkan bahwa tahapan dan peran Humas sebagai mediator belum dilaksanakan dengan maksimal. Tahapan dan hal yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda.

Sedikitnya paparan mengenai aktivitas Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan membuktikan kurangnya kreatifitas humas. Paparan ini meyakinkan bahwa maksimalisasi kerja humas terbilang jauh dari harapan.

Selain publisitas dan menjalankan fungsi mediator, humas juga menjalankan beberapa tugas yang memudahkan kinerja-kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya menemani langsung anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan *reses* atau menyiapkan beberapa kelengkapan informasi rapat.

1. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas.

Di era keterbukaan sekarang ini humas mempunyai peran yang penting dan strategis. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi.

Humas yang berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara Humas dan masyarakat

untuk mewujudkan tujuan bersama diwujudkan melalui beberapa aspek pendekatan atau strategi humas. Salah satunya melalui pendekatan persuasif dan edukatif, dalam hal ini Humas menciptakan komunikasi dan arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling Pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Tujuan kegiatan humas pertama kali adalah berupaya menciptakan saling Pengertian (*mutual understanding*) antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi citra positif perusahaan di mata publiknya.

Peran humas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dirasakan sangat penting dalam membangun citra positif instansi. Selain itu urusan yang padat membuktikan kinerja yang sangat maksimal. Untuk mendukung kinerja-kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan maka humas sangat diharapkan mampu memenuhi hal tersebut. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan dan tuduhan mengenai kinerja yang tidak terlalu baik ketika berhubungan secara *vertikal* dengan masyarakat.

Upaya maksimal aktivitas kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peran kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan selalu dituntut

kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Namun sebelum masuk pada pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja humas, penulis akan mengurai tanggapan Humas tentang pelaksanaan fungsinya .

“Kasubag humas dan staf sudah menjalankan tugasnya selaku mediator dan fasilitator. Koordinasi mereka dengan media dan juga anggota dewan sudah bisa dibilang baik”. (Wawancara dengan Kabag Humas, 19 Maret 2018)

Padahal yang harus diketahui bahwa sasaran humas adalah publik *internal* dan *eksternal*. Secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan *psikologis* yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara definitif, humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara organisasi dan *stakeholder* baik diluar maupun di dalam. Jadi humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplimentasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik.

Inilah yang kemudian janggal dari peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan secara ke dalam memang sudah terlihat berjalan, namun secara ke luar hal itu belum bisa dibuktikan. Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan seharusnya juga berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat Kota Medan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu aktivitas Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan adalah belum terbinanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat.

Seringnya ditemui masalah mengenai kebijakan yang diambil oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampaian pesan baik dan humas seharusnya mampu memfasilitasinya.

Penulis melihat bahwa Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini lebih banyak condong memkasimalkan peran publisitas ketimbang memainkan fungsinya sebagai mediator. Sekalipun fungsi mediator berjalan, itu hanya bersifat ke dalam saja, padahal selain perlu menampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang Pemerintah Kota Medan. Sehingga hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

Staf humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak menyebutkan faktor pendukung bahkan fasilitas juga cenderung untuk dianggap sebagai faktor penghambat kinerja Humas.

“kalau dibilang lengkap, bisa dikatakan fasilitas untuk humas itu sendiri belum lengkap. Tapi di sini dituntut untuk bagaimana memaksimalkan kinerjanya dengan segala kondisi yang dapat kita lihat sekarang ini”.
(Wawancara dengan Ricky Syahputra S.sos, 19 Maret 2018)

Terkait faktor pendukung dan penghambat kinerja kehumasan dikantor

ini, maka penulis menyimpulkan faktor pendukung tersebut antara lain :

- Fasilitas memadai. Observasi penulis menghasilkan ketidakbenaran ujaran yang mengatakan fasilitas belum memadai. Anggaran yang ada dan

ketersediaan ruangan sebenarnya bisa dikatakan sangat mendukung kinerja kehumasan.

- Pembagian kinerja yang sangat spesifik membuat kinerja kehumasan seharusnya lebih mudah.
- Teknologi Komunikasi. Jaringan komunikasi dan ketersediaan teknologi sebenarnya adalah cara untuk senantiasa meng-*update* informasi setiap waktu. Seorang staf humas tidak memiliki lagi alasan untuk kekurangan informasi.

Pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan citra dan reputasi positif harus didukung kebijakan dan komitmen pimpinan puncak. Kemampuan berkomunikasi, baik melalui lisan maupun tulisan adalah salah satu penyampaian pesan, ide, dan gagasan program kerja, dan sekaligus membentuk opini atau menguasai pendapat umum sesuai dengan yang diinginkan komunikator.

Memang ada kecenderungan minimnya budaya mencari informasi yang penulis dapatkan. Bahkan ada yang menganggap biasa saja mengenai pemberitaan yang menganggap Humas DPRD tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah faktor penghambat yang berhasil penulis simpulkan, antara lain :

- Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai. Seorang pejabat humas seharusnya dapat berkomunikasi dengan efektif dan tepat dalam penyampaian pesan kepada sasaran melalui empat syarat :
 - 1) Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian,
 - 2) Pesan dirumuskan dan mencakup pengertian dan diimbangi dengan lambang-lambang yang dapat dipahami oleh publiknya,

- 3) Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi komunikannya dan,
- 4) Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan situasi komunikasi.

- Manajemen Kelembagaan Humas. Manajemen kelembagaan yang sudah usang. Ada baiknya untuk diperbaharui sesuai dengan konteks zaman. Para penyampai aspirasi saat ini sudah memiliki cara yang beragam. Oleh karena itu humas juga diperlukan melakukan adaptasi.

“sekarang soal tata cara menyampaikan aspirasi tidak bisa diintervasi, karena karakter masyarakat berbeda dalam menyampaikan aspirasi, tapi kita juga punya harapan karena disini institusi pemerintahan. Seperti itu tadi, berhubungan dulu dengan humas, protokoler dan bagian umum.”
(wawancara dengan Kabag Humas, 19 Maret 2018)

Humas juga mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran aktivitas kerja dalam instansi. Dengan diperhatikannya kebutuhan atau keinginan staf, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para staf dan aktivitas kerja staf dapat lebih lancar pelaksanaannya tanpa adanya hambatan yang muncul akibat tidak efektifnya aktivitas humas bagi publik *intern*.

Tak hanya itu saja, humas juga berperan sebagai mitra pencitraan *good government* dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang diwakili oleh humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai.

Di Indonesia lembaga kehumasan sangat diperlukan. Humas merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat

membutuhkan banyak informasi dari keterbukaan sebuah lembaga agar mereka mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain demi kemajuan instansi yang bersangkutan, humas tidak hanya memebrikan informasi kepada publiknya akan tetapi humas juga menerima informasi dari publiknya. Dengan kata lain ciri khas dari humas adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik.

Sebagian besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang strategis. Pada akhirnya, perlu pengkajian dan perhatian mendalam atas kualifikasi aparat humas, sistem jenjang karir dan humas sebagai juru bicara pemerintah dapat direalisasikan dengan nyata.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas

Saat ini peranan humas dalam suatu manajemen sangat strategis untuk menunjang tujuan dari suatu perusahaan atau instansi. Fungsi manajemen humas yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan, atau produknya terhadap segmen masyarakat, yang kegiatannya langsung ataupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi, lembaga, perusahaan, dan produknya. Hal tersebut dikemukakan oleh Ruslan bahwa humas berperan sebagai penunjang manajemen, aktivitas organisasi, dan demi tercapainya tujuan bersama dalam suatu organisasi.

Melalui unit dan program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban pemerintahannya.

Saat ini peran humas di institusi-institusi pemerintahan tidak bisa dipandang sebelah mata. Seiring dengan tuntutan reformasi termasuk reformasi dibidang birokrasi, pemerintah wajib menyelenggarakan aktifitasnya dengan memenuhi kriteria asas-asas pemerintahan yang baik. Humas pemerintahan dengan demikian dapat disimpulkan menjadi pemberi informasi kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka suatu kewajiban apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Penulis selanjutnya menjabarkan aktivitas Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas. Dengan adanya humas tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan karena melalui humas, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pemerintahan (publisitas). Hal ini juga dikemukakan oleh Jhon D.Millet bahwa salah satu tugas humas pemerintah yaitu

memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan.

Humas yang baik menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung, presentasi, publikasi, dan lain-lain. Tetapi terletak pada bagaimana organisasi yang dipercayai memiliki kekuatan dalam mengadakan perkembangan secara berkesinambungan yang terbuka untuk dikontrol dan dievaluasi.

Humas suatu alat memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi kepada khalayak dengan menggunakan media. Kehadiran humas bukan merupakan unit struktural yang kaku karena diikat oleh prosedur dan birokrasi yang ada, tetapi posisinya yang langsung berhubungan dengan pimpinan, petugas humas pun harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang di hadapkan kepadanya jika begitu kaku akan menghambat termasuk pula apabila kurang kemampuan humas itu sendiri, baik kualitas, keterampilan dan lain-lain.

Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup kegiatan yang menyangkut banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak) , baik didalam (*public intern*) diluar (*public ektern*). Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khalayak dan kedalam menyerap reaksi dari khalayak.

Humas melibatkan berbagai jenis khalayak dan organisasi. Hubungan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh perusahaan publik dan perusahaan bisnis, tetapi juga boleh asosiasi perdagangan atas nama industri-industri tertentu,

asosiasi atas nama anggota mereka, dan organisasi dan nirlaba lainnya serta pemerintahan kota-kota, Negara dan berbagai instansi pemerintah. Sedangkan masyarakat disini adalah para pemegang kepentingan yang cukup bervariasi, termasuk pemegang saham dan investor, karyawan atau anggota pelanggan dan konsumen, regulator pemerintah, media, dan masyarakat di mana organisasi itu berada.

Humas pemerintah memiliki fungsi yaitu, membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi posisit instansi pemerintah deengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Humas pemerintah pula menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, menjadi penghubung instansi dengan publiknya, serta melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dlam pengelolaan informasi.

Aktivitas humas terkait fungsi publisitas tidak lepas dari pendokumentasian kegiatan kehumasan baik berupa arsip berita, foto, dan film. Dokumentasi juga digunakan untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai suatu peristiwa (*event*) dan kegiatan perusahaan lain yang kemudian dianalisis, dievaluasi, dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Humas juga mengelola *website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dengan melakukan *up-dating* konten secara berkesinambungan juga sebagai salah satu media publisitas. Dalam hal ini, humas mengembangkan jaringan kerja berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan sinergi dan kinerja antar mitra kerja humas dalam mewujudkan *good govermance*. Pemanfaatan jaringan internet

(misalnya *website*), berarti menambah variasi media informasi publik. Variasi media berarti memungkinkan variasi kemasan pesan. Ini penting agar pola penyebaran informasi tidak monoton.

Publisitas menjadi peluang bagi Humas untuk memanfaatkan media massa sebagai penyebar informasi dengan garis, namun juga menjadi tantangan ini berkaitan dengan faktor-faktor dimuat tidaknya informasi dari Humas, ada dua faktor yaitu faktor penulisan materi publisitas dan faktor kualitas hubungan media (*media relations*). Kita dapat melihat bahwa humas tidak lepas dari kegiatan menulis terlebih untuk menjalankan fungsi publisitasnya.

Humas yang menjalankan fungsi publisitas tidak terlepas dari unsur dasar yaitu keinginan komunikasi, dan melalui kegiatan tersebut diharapkan terjadi kecukupan informasi antara perusahaan dengan publiknya. Kecukupan informasi merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. Humas merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai aktivitas Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator. Humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi ke luar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi / lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.

Humas adalah fasilitator atau mediator komunikasi antara perusahaan dan publiknya. Satu kaki dipihak manajemen sedangkan kaki lainnya ada di pihak publik. Sehingga sebagai mediator humas memiliki kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak atau elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Aktivitas mediator ini berpedoman pada model *two ways traffic communication*, yang dirinci kan Ruslan sebagai berikut :

- Berorientasi demi kepentingan tujuan politis dan birokratis pemerintahan,
- Memberikan penerangan dan pendidikan ke masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program kerja pembangunan nasional,
- Meyakinkan masyarakat atau memasyarakatkan tentang maksud dan tujuan peraturan, langkah-langkah serta kebijaksanaan pemerintahan yang ada,
- Menyampaikan atau memonitor tentang pendapat umum agar peraturan dan perundang-undangan itu senantiasa berdasarkan kenyataan yang dapat diterima oleh masyarakat,
- Menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan-keinginan, aspirasi, pendapat, dan persepsi masyarakat pada pemerintah memonitor tanggapan (*feed back*) masyarakat sebagai input atau masukan berguna yang kemudian disampaikan kepada instansi bersangkutan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai publisitas dan mediator, humas harus mengetahui sejauh mana batas pesan/informasi yang dapat dipublikasikan atau pesan / informasi yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka kepada publiknya, khususnya kepada kalangan pers/media massa. Pejabat humas harus dapat

memilih-milih dengan pasti mana diantara informasi dan publikasi, atau berita tersebut yang boleh *direaleas* (disiarkan), atau mana diantara informasi tersebut tidak boleh diketahui secara umum, dan bahkan tertutup untuk kalangan pers / wartawan. Sesuai dengan formula, *Avoid publicity* dan *with-drawal negative news* maka pihak humas harus meneliti atau memilih-milih terlebih dahulu, jenis publikasi, informasi dan berita apa yang boleh dibuka, dan mana yang tidak boleh dibuka (*close communication*) khususnya kepada pihak pers / wartawan.

Tujuan dan proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen humas dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil dan sarannya. Hal tersebut juga dapat diwujudkan jika adanya pertukaran pendapat, pesan, dan informasi yang jelas, serta mudah dimengerti oleh kedua belah pihak yang terlibat komunikator dan komunikan dimana pertukaran informasi dilakukan melalui sistem saluran (*cannel*), media massa atau bentuk non massa lainnya.

Fungsi humas sebagai mediator juga terlihat pada saat penulis melakukan penelitian terkait unjuk rasa yg sering terjadi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Penulis mendapat penjabaran proses yang dilakukan humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam menangani unjuk rasa masyarakat. Humas memediasi antar pihak pendemo dengan pihak DPRD. Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menampung aspirasi masyarakat dan melakukan mediasi antara pihak pengunjuk rasa dengan pihak DPRD. Jadi, dari pihak pendemo akan dipersilahkan masuk ke

rungan dan dipertemukan dengan pihak DPRD (tim penerima aspirasi). Kemudian humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan berperan sebagai mediator antara masyarakat dan DPRD.

Peranan humas sebagai mediator tidak terlepas dari empat kategori yang telah dibagi oleh Dozier D.M. Salah satunya yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Humas juga bertindak sebagai persuader, sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan mentoleransi yang baik dari kedua belah pihak.

Dalam menjalankan fungsi mediator, aktivitas humas meliputi membina hubungan ke dalam (*publik internal*), yang dimaksud *public internal* adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang Humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Membina hubungan keluar (*public eksternal*), yang dimaksud *public eksternal* adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang

diwakilinya. Dengan demikian, peran humas bersifat dua arah yaitu berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan ke luar (*outward looking*).

Sejauh ini humas DPRD dalam menjalankan aktivitasnya sebagai fungsi mediator dan publisitas sudah baik, terlihat dari beragam kegiatan yang dilaksanakan DPRD mulai dari menganalisis sampai pada kegiatan mengevaluasi kegiatannya, hal ini juga adanya dukungan dari pimpinan DPRD, kredibilitas suatu perusahaan atau instansi dimulai dari integritas serta tindakan manajemen puncak. Dalam menjalankan aktivitasnya humas juga sangat memerlukan bantuan dan kerjasama top manajemen sebagai *layer* utama sumber informasi yang sah.

Dari hasil observasi dan wawancara, penulis melihat banyak aktivitas-aktivitas kehumasan di DPRD yang telah diprogramkan namun belum berjalan secara maksimal. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan DPRD dan beberapa program kerja kehumasan yang tidak maksimal kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja kehumasan DPRD sekaligus dapat dijadikan indikasi keberhasilan aktivitas humas dalam menjalankan aktivitasnya. Fakta-fakta tersebut semakin mendukung penulis untuk mencari tau faktor-faktor yang menghambat aktivitas humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

4.1.2 Faktor – Faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas

DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan faktor-faktor yang menghambat aktivitas humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai fungsi mediator dan publisitas. Ruslan mengemukakan bahwa pada prinsipnya secara struktural fungsi humas dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak

dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. Humas terkait langsung dengan fungsi *top management*. Fungsi kehumasan dapat berhasil secara sepihak apabila berada langsung dibawah pimpinan atau mempunyai hubungan langsung dengan pimpinan tertinggi (pengambilan keputusan) pada organisasi-organisasi / instansi yang bersangkutan. Kedekatan Humas dengan *top management* dapat memberikan pengetahuan yang jelas dan rinci mengenai suatu sistem terpadu, pola perencanaan, kebijakan, keputusan yang diambil, visi dan arah tujuan organisasi bersangkutan. Hal ini perlu agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan dan informasi dari lembaga / organisasi kepada publiknya.

Pekerjaan humas terbilang kompleks sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mewakili kemampuan dan *skill* manajemen kehumasan, sedangkan staf humas yang ada di DPRD tidak ada yang mempunyai latar belakang pendidikan terkait kehumasan. Dalam artian bahwa pengetahuan staf humas akan dunia kehumasan masih terbilang kurang. Hampir semua staf humas belajar sendiri dalam menjalankan aktivitas kehumasan entah melalui literatur, forum kehumasan, dan ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang kehumasan.

Seorang humas seharusnya memiliki kemampuan cukup komplit. Dia harus memiliki karakter yang merupakan perpaduan seni dengan profesional yang baik dalam kemampuan manajerial, teknis, motivator, komunikator, perencanaan, pelaksanaan, hingga mengevaluasi program kerja dan sebagainya..

Tentunya dengan pengetahuan tentang kehumasan yang kurang staf humas mendapat banyak tantangan. Berbicara mengenai tantangan dalam menjalankan

fungsi humas sebagai publisitas, salah satu tantangan yang paling mendasar menurut Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu mengenai prinsip-prinsip pengolahan data dan informasi. Humas baru siap mengupdate informasi yang *update* .

Ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan aktivitasnya, adanya tuntutan pengujian kemampuan praktisi humas baik segi kemampuan manajerial, maupun segi teknis mengelola manajemen humas dan manajemen komunikasi pada sebuah organisasi/perusahaan yang maju dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan, atau kompetisi kian tajam pada informasi era terbuka.

Yang menjadi tugas berat humas yaitu mencegah munculnya informasi negatif tentang perusahaan yang dimuat di media, karena hal ini menyebabkan opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat. Sekali informasi negatif muncul di media, maka opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat. Dampaknya citra perusahaan akan jatuh. Keberhasilan humas dalam mencegah munculnya informasi ini bisa dijadikan indikator keberhasilan kerja seorang humas.

Seorang humas harus mampu menonjolkan dirinya sebagai sebuah organisasi yang dapat menciptakan citra positif perusahaan, kewajiban humas lah yang harus mengubah pemikiran masyarakat agar satu perusahaan atau lembaga dapat dikenal baik. Ini merupakan tantangan bagi seorang humas, tetapi semua itu dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dan juga dengan tujuan yang baik pula. Humas yang bernaung di daerah pemerintahan seperti ini memang harus

bekerja ekstra, apalagi humas DPRD yang kita ketahui bahwa citra anggota dewan dimata masyarakat pun jarang sekali yang positif.

Sangat penting bagi humas dalam hal ini Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bekerjasama dengan media dalam kondisi apapun. Tidak hanya menghubungi media di saat media dibutuhkan. Humas adalah mitra kerja media, setiap saat saling membutuhkan hal-hal yang membuat munculnya berita negatif yaitu ketika tersumbatnya secara komunikasi, humas gagal memosisikan diri sebagai *dominat-coalition*, dan hubungan media yang kurang baik. Kecenderungan ini terjadi juga karena humas hanya semata-mata berdiri dari sudut kepentingan perusahaan/instansi. Akibatnya informasi yang diberikan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Padahal humas adalah mediator antara perusahaan dengan publik, karena itu kepentingan publik semestinya dipikirkan bukan hanya kepentingan perusahaan saja. Media sangat berpengaruh bagi pekerjaan humas, terlebih perusahaan membutuhkan citra positif agar masyarakat meyakini bahwa perusahaan tersebut memang sudah menjalankan tugas nya dengan baik. Kerja sama antar media dan humas tidak terlepas bahkan sangat mengikat satu sama lain, oleh sebab itu masing-masing dari keduanya harus saling membangun kerja sama yang positif mengingat peran dari keduanya sangat diperlukan.

Masih banyak hal yang perlu diperhatikan, dibenahi, dan disempurnakan oleh Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan terkait aktivitasnya dalam menjalankan fungsi sebagai mediator dan publisitas. Hal tersebut dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber

daya manusia, penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisai, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sangat diharapkan aktivitas Kehumasan DPRD sesuai SOP (*Standard Operating Procedures*) sehingga kegiatan kehumasan dapat terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel sekaligus sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga masyarakat dapat mempercayai pmerintahan nya dikelola dengan baik dan tidak dikelola dengan cara yang salah. Karena kepercayaan masyarakat sangat sensitif, sehingga humas harus bekerja ekstra untuk membangun citra positif bagi masyarakatnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Aktivitas Humas DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator memfokuskan kinerjanya pada publik *eksternal* dan dalam fungsi publisitas Humas DPRD Kota Medan melakukan kliping dan pendokumentasian semaksimal mungkin terkait kerja anggota dewan. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang akan atau telah dilakukan oleh anggota dewan melalui *website*.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat aktivitas Humas DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas yaitu :
 - Adanya fasilitas yang memadai seperti ketersediaan teknologi dan jaringan komunikasi serta adanya pembagian kinerja yang sangat spesifik sehingga diharapkan mampu memudahkan kinerja kehumasan itu sendiri,
 - Sedangkan faktor yang menghambat yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang berkompetensi serta manajemen kelembagaan yang sudah usang sehingga menyulitkan humas untuk beradaptasi sesuai tuntutan zaman.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Humas DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme humas sebagai peran utama untuk pengelolaan informasi, dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan manajemen komunikasi dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan pemerintahan yang baik,
2. Berita yang disajikan harus *up to date* agar masyarakat tidak kekurangan informasi tentang kinerja anggota DPRD Kota Medan.

Daftar Pustaka

- Anggoro, M. Linggar. 2000. *Teori dan Profesi Kehumasan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro dkk. 2004. *Komunikasi Massa*. Bandung. Simbiosis Rekatama.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, Hafied. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cutlip, M. Scoot, dkk. 2009. *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dewi, Sutrisna. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
- Effendy, onong Uchyana. 2009. (a) *Human Relation & Public Relation*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
-, 2009. (b) *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Hermawan, Agus. 2012. *Komunikasi Pemasaran*. Jakarta. Erlangga
- Kriyantono, Rachmad. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta:Prenada Media Grup.
- Moore, Fraizer. 2005. *Humas*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2013. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta:Rajawali Pers.
-,2010. *Manajemen, Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Soemirat, dkk. 2010. *Dasar-Dasar Public Relation*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.

Sumber lain :

<http://belajarkomunikasi.blogspot.com> Diakses Pada 20 Desember 2017

<http://manajemenkomunikasi.blogspot.com> Diakses Pada 23 Desember 2017

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 EkL 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

pada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU KOMUNIKASI
 FIP UMSU

Medan, 29 November 2017.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : ELWIRA FARADILA
 N P M : KD3110066
 Jurusan : ILMU KOMUNIKASI (HUTAS)
 Tabungan sks : ...133... sks, IP Kumulatif 3,43

mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan

AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MEDAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS	✓ 29/11-2017
OPINI MAHASISWA MENGENAI KINERJA KARYAWAN DPRD KOTA MEDAN (STUDI KASUS MAHASISWA FISIF USU MEDAN)	
UPAYA HUMAS DPRD KOTA MEDAN DALAM MEMULHUKAN CITRA ANGGOTA DPRD MEDAN	

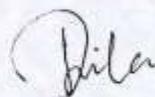
Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- anda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- after Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- anda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyampaikan kepada Ketua Jurusan :
 Menyerahkan kepada Dekan untuk
 Menyetujui Judul dan Pembimbing.

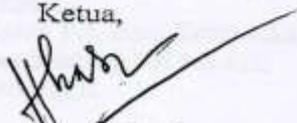
Pemohon,



(ELWIRA FARADILA)

PB : M. SAID

Ketua,



(Nasution)

Menyerahkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Jurusan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 29 /SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal **29 November 2017** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ELVIRA FARADILA**
N P M : 1403110066
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MEDAN
SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS.**

Pembimbing : Muhammad Said Harahap., S.Sos., M.I.Kom.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437H / 26 Oktober 2015 M.

Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 29 November 2018

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 10 RabiulAwal 1439 H
29 Nopember 2017 M



Drs. Tasrif Syam., M.Si.

Pembusuan :

- Ketua P.s. Ilmu Komunikasi
- Pembimbing Di Medan;
- Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : **282**KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2018 Medan, 04 Djumadil Akhir 1439 H
Lampiran : -,- 20 Februari 2018 M
Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
Ibu Kabag Humas
Sekretariat DPRD
Kota Medan
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **ELVIRA FARADILA**
N P M : 1403110066
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MEDAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU

Medan, 15 Januari 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ELVIRA FARADILA
N P M : 1403110066
Jurusan : Ilmu Komunikasi

menyampaikan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MEDAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR
DAN PUBLISITAS

Sesama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

M. Said Harahap, S.Sr.N.Kepm

Pemohon,

Elvira Faradila
(..... ELVIRA FARADILA)

Program studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Sabtu, 20 Januari 2018
 Waktu : 08.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Peranggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	SABDA RIANDANU	1403110158	1 IRWAN SYARI TJG, S.Sos., M.AP.	1 DEWI KURNIAWATI, Hj, P.hd	PENGARUH IKLAN TELKOMSEL VERSI SIMPATI COMBO GIGA ROCK MELALUI MEDIA TELEVISI TERHADAP SIKAP KONSUMEN (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara)
17	INTAN PUTRI YOSEFA	1403110248	1 BAHRUM JAMIL, Drs, M.AP	1 AKHYAR ANSHORI,S.Sos., M.I.Kom	EFEK IKLAN TRANSPORTASI ONLINE OLEH ARTIS TERHADAP PENINGKATAN PENGGUNA (Studi Deskriptif Pada Pengguna Gojek di Medan)
18	DINDA NUR AKMALIAH	1403110193	1 RUDIANTO, S.Sos, M.Si, Dr	1 LEYLIA KHAIRANI, Dr, M.Si	DEKONTRUKSI PERAN PEREMPUAN DALAM SINETRON (Analisis Perubahan Sosial Dalam Sinetron Dunia Terbaik)
19	ELVIRA FARADILA	1403110066	1 AKHYAR ANSHORI,S.Sos., M.I.Kom	1 MUHAMMAD SAID HARAHAP, M.I.Kom	AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MEDAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS
20	RIDHO SYAH PUTRA	1403110229	1 TENERMAN, S.Sos, M.I.Kom	1 JUNAIDI, S.Pd. M.Si.	PENGGUNAAN SIMBOL - SIMBOL ISLAM DALAM MENARIK CUSTOMER PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) MEDAN

Medan, 03 Djuadil Awwal 1439 H
 20 Januari 2018 M



Dekan,
 Drs. Tasrif Syam, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ELWIRA FARADILA
 NPM : 1403110066
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21/11/2017	Perbaiki judul skripsi	
	7/12/2017	Tambahkan uraian teoritik tentang komunikasi massa	
	11/12/2017	Perbaiki Daftar Pustaka	
	7/2/2018	Perbaiki metode penelitian & penulisan	
	23/2/2018	Perbaiki penulisan	
	6/3/2018	Perbaiki Penyusunan hasil penelitian.	
	19/3/2018	Perbaiki Daftar Pustaka	
	21/3/2018	ACC Skripsi / meja hijau	

Medan, ..21..... maret.....2018...

Dekan,

 Rudianto M.Si.
 SPAN ARKAD

Ketua Program Studi,

 Nurhatimah Nst. M.Kom

Pembimbing ke :,

 M. Said Harahap M.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

SK-6

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 23 Mei 2018...

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Elwita Faradita
 N P M : 1903110066
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Alamat rumah : Jl. Mj. Sutoyo, Komp. Pjka, Blok 23
 Telp : 0823 2578 7783

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 4 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 2).

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Pemohon,
Elwita
 (.....Elwita Faradita.....)

Disetujui oleh ;

Medan,20.....

Medan, 23 Mei 2018...

Plt.Dekan,

a.n.Rektor,
 Wakil Rektor - I

Dr. RUDIANTO, M.Si)

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



... dan Terpercaya
... agar disebutkan
... lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : Elwita Faradila
Tempat, tgl. lahir : Tebing Tinggi, 05 Agustus 1997
Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
N P M : K0210066
Alamat Rumah : Jl. Mj Suboto, Komp. Pjfa, Blok 23
Telp/HP. : 0823 2570 753
Pekerjaan/Instansi :
Alamat Kantor :
Telp/HP. :

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



Elwita Faradila

Elwita Faradila



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SK-8

BORANG DATA ALUMNI



I. DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP	Ewlita Fatmaha	L/P*
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Tebing Tinggi, 05 Agustus 1997	
AGAMA	Islam	
SUKU BANGSA	Indonesia	

II. KEMAHASISWAAN

TAHUN MASUK UMSU	2019
N P M	1403110066
JURUSAN	Ilmu Komunikasi
ASAL SEKOLAH	SMK Swasta F. Tandean Tebing Tinggi.
ALAMAT SEKOLAH	Jl. Sutomo
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.

III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI

JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI	TANGGAL
	NILAI :	IPK : PREDIKAT :
NILAI/IPK/PREDIKAT		
JUDUL SKRIPSI		

IV. KETERANGAN KELUARGA

STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA ORANG, WANITA ORANG =ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	
TELEPON/HP	
NAMA AYAH	Djamiluddin
NAMA IBU	Nuraini
PEKERJAAN ORANG TUA	Pensiunan PT. FAI
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jl. M.J. Sutarto, Kamp. BKA, Blok 23 / 20633
TELEPON/HP	0813.9774 9688

V. KETERANGAN PEKERJAAN

PEKERJAAN	
ABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10

UNDANGAN/PANGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 415/UND.II.3-A/UMSU-03/F/2018

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08,00 s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJIL			Judul Skripsi
			PENJIL I	PENJIL II	PEMBIMBING	
31	MEILINDA RAHMASARI REFINDRA	1403110010	Drs. ZULFAHM, M.I.Kom	MURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	ELVITA YENNI, S.S, M.Hum	PEMANFAATAN API IKASI KAI ACCESS DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN TIKET ONLINE PT. KERETA API MEDAN
32	HERA KUSRINI	1403110189	IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP	MURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	Hj. ASMAWITA, AM, MA	PERAN SELEBRAN AKUN WARDAH MAULINA TERHADAP KEPUTUSAN UNTUK BERCADAR (Studi Pada Anggota Natlawardah Medan)
33	EL VIRA FARADILA	1403110066	Dr. RUDIANTO, M.SI	Dr. ARIFIN SALEH, M.SP	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M. I.Kom	AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MEDAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS
34	FAUZI HAMDANI	1403110109	Dr. YAN HENDRA, M.SI.	PULI SANTOSO, S.S, M.SP	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M. I.Kom	OPINI PUBLIK DRIVER ONLINE GO-JEK TERHADAP KEPUTUSAN CUSTOMER YANG MELAKUKAN ORDERAN FIKTIF DI KOTA MEDAN
35	WIDYA NINGTIAS	1403110118	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	JUNAIDI, S.PdI, M.SI	Hj. ASMAWITA, AM, MA	STRATEGI KOMUNIKASI SALAM TV DALAM MENGEBAWANGKAN PROGRAM PROGRAM DAKWAH

1.
Yotulis Sidang :

Ditetapkan oleh :



Kelua,

Medan, 10 Rajab 1439 H

27 Maret 2018 M

Panitia Ujian

Sekretaris





PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/418 /Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan telah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan I FISIP UMSU Nomor: 2/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018 Tanggal: 20 Februari 2018 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Elvira Faradila.
NPM : 1403110066.
Prodi : Ilmu Komunikasi.
Lokasi : DPRD Kota Medan.
Judul Skripsi : Aktivitas Humas DPRD kota Medan Sebagai Fungsi Mediator Dan Publisitas .
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I FISIP UMSU.

Agan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .

Pada Tanggal : 19 Maret 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M. Pd

REMBINA TK. I

19531114 198403 1 002

usan :

Walikota Medan (sebagai Laporan).
Sekretaris DPRD Kota Medan.
Wakil Dekan I FISIP UMSU.
Yang bersangkutan.
bertinggal.



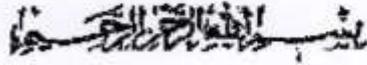
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238

menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3632 /KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2018



berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : **Elvira Faradila**
N P M : 14031101066
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Komunikasi

ini menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 07 Rajab 1439 H.
24 Maret 2018M



An. Plt. Kepala UPT Perpustakaan
Koord. TU

T. Syahbakar Umri, SE